

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penghasilan sebuah negara sebagian besar diperoleh dari pungutan pajak terhadap warganya. Penghasilan yang diperoleh oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Atas pengertian tersebut, pajak diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan negara untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sesuai dengan pancasila sila kelima.

Salah satu pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada warga negara adalah pajak penghasilan. Sesuai Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menunjukkan bahwa entitas badan atau perusahaan merupakan salah satu subjek pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak sesuai tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pernyataan dalam undang – undang tersebut menunjukkan bahwa semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan meningkat. Meningkatnya jumlah pajak yang dibayarkan

oleh perusahaan menjadikan beban yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih besar, di sisi lain penerimaan negara akan meningkat. Perusahaan berusaha untuk mengefisienkan pembayaran pajaknya, hal ini disebut dengan manajemen pajak. Menurut Suandy (2011:6) manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak mempunyai beberapa tahapan antara lain perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak.

Data Direktorat Jenderal Anggaran menunjukkan bahwa ada peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan mengalami peningkatan dalam periode 2011 – 2013. Pada tahun 2011 penerimaan pajak sebesar 816,42 triliun, tahun 2012 meningkat menjadi 976,90 triliun. Data pada tahun 2013 penerimaan dari sektor pajak telah mencapai 1.139,32 triliun. Fakta ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penting bagi pemerintah dan para pembuat keputusan di Indonesia untuk mengetahui masalah yang terkait yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak sehingga dapat memperbaiki regulasi yang sudah ada.

Dalam beberapa tahun belakangan, jumlah perusahaan yang berada di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Peningkatan ini terutama terjadi pada perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, perkembangan industri manufaktur meningkat dalam periode 2011 – 2013 sebesar 4,62% tiap tahunnya. Hal ini

menunjukkan bahwa sektor manufaktur merupakan sektor yang potensial khususnya dalam penerimaan pajak dari perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia sebagian besar adalah perusahaan yang didirikan oleh sebuah keluarga. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Sanjaya (2011) yang menyatakan bahwa 68,49% perusahaan dalam bidang manufaktur di Indonesia dimiliki oleh keluarga.

Kepemilikan keluarga dapat diperoleh dari warisan yang diberikan keluarga pendiri (*Founder Family*) kepada generasi berikutnya atau sebuah keluarga membeli saham mayoritas dari sebuah perusahaan sehingga mendapatkan kendali penuh atau sebuah perusahaan. Ada dua macam kepemilikan keluarga yaitu kepemilikan secara langsung atau *direct ownership*. Kepemilikan keluarga secara langsung adalah kepemilikan yang langsung dimiliki oleh sebuah keluarga secara langsung. Ada juga kepemilikan secara tidak langsung atau *indirect ownership*. Kepemilikan secara tidak langsung adalah kepemilikan keluarga yang dimiliki oleh sebuah keluarga dari sebuah perusahaan untuk memiliki perusahaan yang lain. Kepemilikan keluarga yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kepemilikan keluarga secara langsung (*direct ownership*). Menurut Chen *et al.* (2008) sebuah perusahaan dimiliki oleh keluarga apabila keluarga memiliki pernyertaan saham $\geq 5\%$ pada sebuah perusahaan dan ada anggota keluarga yang turut serta dalam jajaran manajemen.

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Chu, 2011) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga dalam sebuah perusahaan berpotensi menimbulkan masalah yaitu masalah keagenan. Chen *et al.* (2008) menyatakan bahwa masalah keagenan

yang terjadi dalam perusahaan keluarga berbeda dengan masalah keagenan yang terjadi pada perusahaan non-keluarga. Konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas yang lebih besar dibandingkan dengan konflik antara pemilik dan manajer. Hal ini terjadi karena kepemilikan keluarga atas perusahaan lebih besar dan keluarga berinvestasi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung untuk melakukan manajemen pajak karena pemilik keluarga memperoleh manfaat yang besar dari manajemen pajak yang dilakukan.

Menurut (Chu,2011) perusahaan yang dikelola oleh sebuah keluarga lebih bernilai dan mempunyai kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak dikelola oleh keluarga. Anderson dan Rebb (2003) menyatakan *Return on Asset* dan *Return on Equity* dari perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dimiliki oleh keluarga. Dari pernyataan tersebut dapat disebutkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh sebuah keluarga sangat memperhatikan nilai dari perusahaan yang dikelola. James (1999) berpendapat bahwa keluarga akan berinvestasi dengan cara yang efisien karena lebih fokus untuk mewariskan kekayaan bagi generasi dibawahnya dibanding mengkonsumsi sendiri semasa hidupnya. Oleh karena itu, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung melakukan manajemen pajak agar laba yang diperoleh menjadi lebih besar.

Ada beberapa penelitian terlebih dahulu yang meneliti tentang kepemilikan keluarga antara lain adalah penelitian Bauweraets dan Vandernoot (2013). Bauweraets dan Vandernoot (2013) melakukan penelitian apakah perusahaan

yang dimiliki keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel dari perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan agresivitas pajak antara perusahaan yang dimiliki keluarga dengan perusahaan yang tidak dimiliki oleh keluarga. Dengan menggunakan *Effective Cash Tax Rate* sebagai alat pengukur agresivitas pajak, diperoleh hasil bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih agresif daripada perusahaan yang tidak dimiliki oleh keluarga. Jadi, perusahaan yang dimiliki keluarga cenderung melakukan tindakan pajak yang agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Bauweraets dan Vandernoot (2013) menggunakan keluarga sebagai variabel independen dan *tax aggressiveness* sebagai variabel dependen. *Size, Return on Asset, Leverage, PPE* sebagai variabel kontrol. Selain penelitian yang dilakukan oleh Bauweraets dan Vandernoot (2013), ada penelitian yang hasilnya berkebalikan. Chen *et al.* (2008) melakukan penelitian pada perusahaan di Amerika Serikat yang tergabung dalam S&P 1500 Index yang terdaftar di *Compustat* periode 1996 – 2000, menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini agresivitas pajak dihitung menggunakan *Effective Tax Rate* dan *Cash Effective Tax Rate*. Hal ini disebabkan karena pemilik perusahaan keluarga lebih memperhitungkan adanya resiko denda dan rusaknya reputasi perusahaan dari pemeriksaan pajak akibat dari kegiatan perpajakan yang agresif. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang dimiliki keluarga rela untuk membayar beban pajak lebih banyak untuk menghindari resiko pemeriksaan pajak dan rusaknya reputasi perusahaan.

Perusahaan manufaktur merupakan sektor yang sangat potensial dewasa ini. Menurut data Bursa Efek Indonesia, kapitalisasi saham terbesar pada periode 2011- 2013 berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, sektor manufaktur termasuk salah satu bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia sampai tahun 2025. Kedua hal tersebut menandakan bahwa kompetisi antar perusahaan manufaktur akan semakin meningkat. Oleh karena itu, mekanisme *Corporate Governance* sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance*, *Corporate Governance* didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan berlaku lainnya.

Indonesia menempati peringkat ke-41 dari 49 negara dalam penerapan praktek *good corporate governance* (GCG). Data ini berdasarkan hasil pantauan *Governance Metrics International* (GMI). Di lingkungan negara anggota ASEAN, Indonesia kalah dengan Thailand (posisi ke-15 dengan skor 5,75), Singapura (posisi 17, skor 5,65), Filipina (posisi 21, skor 5,50), dan Malaysia (posisi 29 dengan skor 4,72). Sejumlah negara yang berada di bawah Indonesia adalah Brazil, Cina, Yunani, Kolombia, Korea Selatan, Maroko, Yordania, dan Mesir. Dari survei tersebut menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena mekanisme *corporate governance* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Pada tahun 1999, dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance yang membuat pedoman tentang tata cara penerapan *Good Corporate Governace*. Terdapat lima asas *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Komite Nasional Kebijakan Governance menyatakan bahwa ada 3 unsur penting untuk mewujudkan *Corporate Governance* secara efektif antara lain, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Pada penelitian ini, penulis berfokus untuk membahas tentang Dewan Komisaris.

Salah satu unsur penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan perusahaan dikelola dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mengawasi operasional perusahaan. Adanya dewan komisaris sebagai organ perusahaan merupakan perwujudan dari *Corporate Governance* yang dijalankan oleh perusahaan. Penelitian ini berfokus untuk membahas karakteristik dewan komisaris. Karakteristik yang akan dibahas adalah ukuran dewan komisaris, keragaman gender dewan komisaris, dan jumlah komisaris independen. Ukuran dewan komisaris menunjukkan berapa banyak orang yang menjadi anggota dewan komisaris. Unsur ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja dari dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Keragaman gender dewan komisaris menunjukkan perbandingan jumlah anggota dewan komisaris

yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Kombinasi gender dalam dewan komisaris dapat mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap manajemen. Dewan komisaris independen dimaksudkan untuk menambah kualitas pengawasan kinerja sebuah perusahaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pencatatan Efek No 1-A PT Bursa Efek Indonesia butir 1-a yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris. Adanya peningkatan kesadaran investor bahwa kewajiban perpajakan perusahaan mempengaruhi pengembalian investasi mereka membuat perusahaan berusaha memperlihatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Pimpinan perusahaan termasuk dewan komisaris berpengaruh terhadap strategi manajemen pajak yang diambil oleh perusahaan.

Beberapa penelitian tentang karakteristik dari dewan komisaris antara lain penelitian Zemzem dan Ftouhi (2013). Zemzem dan Ftouhi (2013) menyatakan bahwa ukuran dan persentase wanita dalam dewan komisaris mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan jumlah dewan komisaris independen dan peran ganda anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jalali dan Jalali (2013). Penelitian ini menemukan bahwa rasio anggota dewan komisaris non – eksekutif, rasio perubahan komposisi dewan komisaris, dan peran ganda dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kebijakan agresivitas pajak. Mulyadi *et al.* (2014) menemukan bahwa dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris independen berhubungan negatif terhadap manajemen pajak

(*Current ETR* dan *GAAP ETR*). Ukuran dewan komisaris menunjukkan hubungan negatif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan *Current ETR* dan berhubungan positif dengan manajemen pajak yang diukur dengan *GAAP ETR*.

Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi sehingga variabel – variabel tersebut akan dilakukan penelitian ulang sesuai dengan kondisi yang sesuai di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk mencari pengaruh kepemilikan keluarga dan karakteristik dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan. Selain kepemilikan keluarga dan karakteristik dewan komisaris, penelitian ini akan menggunakan variabel kontrol. Penggunaan variabel kontrol ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah variabel dependen pada penelitian ini hanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang dipilih atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang dipilih. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ROA*, ukuran perusahaan, dan *Leverage*. Variabel ini secara konsisten mempengaruhi manajemen pajak pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan menggunakan judul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2011 – 2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan keluarga mempengaruhi manajemen pajak perusahaan?

2. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi manajemen pajak perusahaan?
3. Apakah keragaman gender dalam dewan komisaris mempengaruhi manajemen pajak perusahaan?
4. Apakah persentase dewan komisaris independen mempengaruhi manajemen pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh keragaman gender dalam dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh antara persentase dewan komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan dampak dari Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik Dewan Komisaris terhadap

kegiatan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga *going concern* dapat dicapai.

3. Bagi bidang pendidikan, diharapkan dapat berkontribusi secara tidak langsung dalam pengembangan literatur bidang akuntansi keuangan dan perpajakan tentang Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik Dewan Komisaris yang dianggap dapat mempengaruhi aktivitas manajemen pajak perusahaan.
4. Bagi pembuat peraturan, penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk menyediakan wawasan penting bagi pembuat peraturan pajak agar dapat mengidentifikasi faktor – faktor yang berpengaruh dalam kegiatan manajemen pajak perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar objek penelitian dapat dimengerti dengan jelas maka sistematika yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini merupakan pengenalan terhadap masalah yang akan dibahas, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah adalah dasar pemikiran peneliti terhadap fenomena yang terjadi secara garis besar sehingga menumbuhkan minat peneliti untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah adalah rumusan dari fenomena yang memerlukan pemecahan melalui penelitian, analisis berdasarkan teori, konsep, dan alat yang relevan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

pengaruh kepemilikan keluarga dan karakteristik dewan komisaris terhadap manajemen pajak.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori – teori yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan, yaitu: teori keagenan, teori *stewardship*, *corporate governance*, dewan komisaris, gender, manajemen pajak, *ROA*, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Selain itu, tinjauan pustaka juga mencakup definisi, ruang lingkup, manfaat variabel independen dan variabel kontrol. Dalam bab ini juga menyertakan ringkasan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan kerangka konseptual.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, identifikasi variabel yang terdiri dari variabel bebas, variabel bergantung, dan variabel kontrol yang akan digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur dalam pengumpulan data, populasi dan proses pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang memuat uraian tentang subjek dan objek penelitian, deskripsi masing - masing variabel, analisis model, dan pengujian hipotesis serta penjelasan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian secara menyeluruh, deskripsi hasil penelitian menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 18, dan diskusi mengenai hasil penelitian.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Bab ini berisi penjelasan inti atas hipotesis yang telah diungkapkan sebelumnya dan penarikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta saran – saran untuk penelitian lebih lanjut.

